

## **SAMBUTAN DEKAN**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang dengan tema "Sinergisitas Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Kurikulum Pendidikan Ilmu Hukum di Indonesia" merupakan agenda rutin Fakultas Hukum dalam upaya peningkatan kapasitas peneliti.

Seminar Nasional ini mengundang para dosen, praktisi, dan pemerhati hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Melalui Seminar ini, juga diharapkan dapat memperluas jejaring kerjasama antar peneliti di perguruan tinggi tersebut, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum.

Atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Kanjuuruhan Malang, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terlaksananya Seminar Nasional Sipendikum 2017 ini. Seminar ini dapat berlangsung dengan sukses berkat usaha Panitia Penyelenggara dan partisipasi Peserta Seminar.

Akhir kata, Selamat telah Sukses menyelenggarakan Seminar Nasional Sipendikum 2017.

Wassalamualaikum wr.wb.

Malang, 13 Mei 2017

Dekan,

Dr. Suciati, SH, M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Seminar Nasional dan *Call For Papers* (SIPENDIKUM) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang sebagai wujud kontribusi kami dalam meningkatkan kapasitas ilmu hukum. Seminar Nasional Sipendikum ini mengambil tema: “**SINERGISITAS NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP KURIKULUM PENDIDIKAN ILMU HUKUM DI INDONESIA.**” Tema ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan sehingga Pancasila perlu diadopsi dalam pengetahuan hukum di Indonesia dengan harapan Negara kita memiliki ciri khas hukum yang Pancasilais. Selain itu, kapasitas peneliti di perguruan tinggi harus ditingkatkan, agar dapat menghasilkan penelitian yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam kehidupan dengan berdasar Pancasila.

Kegiatan Seminar dan *Call For Papers* ini diawali dengan presentasi dari nara sumber Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia (APPSIHI) dan Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kanjuruhan Malang, yang dilanjutkan presentasi secara parallel oleh pemakalah. Dalam seminar nasional ini, kami menerima makalah yang berupa hasil penelitian para dosen dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Makalah yang dinilai layak sesuai penilaian dari tim penilai, dipresentasikan dan diterbitkan pada Prosiding Seminar Nasional ini.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar dan pemakalah yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini.

Malang, 13 Mei 2017

Ketua Pelaksana,

Sulthon Miladiyanto, SH,MH

## DAFTAR ISI

DEWAN PENYUNTING .....	i
SAMBUTAN DEKAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv

### **ASPEK PANCASILA**

PARADIGMA KEADILAN SOSIAL DALAM PERSEPEKTIF PANCASILA: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMENUHAN KEADILAN SOSIAL TERHADAP WARGA NEGARA .....	i-11
<i>Fatkhul Muin</i>	
SINERGISITAS NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KURIKULUM ILMU HUKUM .....	12-25
<i>Oksep Adhayanto</i>	
KEADILAN SOSIAL DALAM HUKUM TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	26-34
<i>Wahyu Kurniawan</i>	
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA BIROKRASI .....	35-46
<i>Zuhrizal Fadhy</i>	

### **ASPEK KEWARGANEGARAAN**

HAK – HAK WARGA NEGARA DIRAMPAS (Studi Kasus Pembalakan Hutan Dan Pembakaran Lahan Di Indonesia).....	47-57
<i>Irsadi Aristora</i>	
NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PRADIGMA PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN MAHASISWA .....	58-70
<i>Ayu Dian Ningtias</i>	

### **HUKUM PIDANA**

ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERLINDUNGAN SAKSI PIDANA .....	71-80
<i>Adam Sani</i>	

PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI.....	81-91
<i>Apri Rotin Djusfi</i>	
NORMA KESUSILAAN SEBAGAI DASAR PENCELAAN PERBUATAN PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET: SUATU ORIENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA .....	92-105
<i>Hwian Christianto</i>	
KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....	106-122
<i>Muhammad Abdul Rouf</i>	
ANALISIS INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 .....	123-135
<i>Rena Zefania Ritonga</i>	
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 3094/PID. B/ 2013 TENTANG ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM PASAL 114 AYAT (2) JUNCTO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. ....	136-149
<i>Tobias Gula Aran</i>	

## **HUKUM PERDATA**

KEADILAN: DILEMA ANTARA TRANSPORTASI ONLINE DAN TRANSPORTASI KONVENSIONAL .....	150-160
<i>Rifkiyati Bachri</i>	
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KONTRAK BAKU .....	161-170
<i>Sri Budi Purwaningsih</i>	
QUO VADIS: PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK MELALUI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KONTRAK UNIVERSAL DAN SISTEM HUKUM KONTRAK INDONESIA... 171-182	
<i>Susianto</i>	

## **HUKUM TATA NEGARA dan HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

JEMBER MENGGAGAS KOTA RAMAH KAUM DIFABEL (STUDI ANALISIS PERDA DIFABEL DIKOTA JEMBER) .....	183-197
<i>Ana Laela Fatikhatus Choiriyah, Ken Ismi Rozana , M. Khoirul Hadi al-Asy'ari</i>	
INTEGRASI NILAI PANCASILA DENGAN MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	198-207
<i>Hendra Sudrajat</i>	

MEMASYARAKATKAN IDE PANCASILA SEBAGAI BATU UJI DALAM JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN KAMPUS .....	208-222
<i>Jamaludin Ghafur</i>	
IDEALISME KEDUDUKAN PANCASILA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN: ANTARA KELSEN DAN NAWIASKY PADA ILMU PERUNDANG- UNDANGAN .....	223-235
<i>Ricca Anggraeni</i>	
REPOSITIONING APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU <i>GOOD GOVERNANCE</i> ....	236-251
<i>Rini Irianti Sundry</i>	
DISKURSUS PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS .....	252-260
<i>Tomy Michael</i>	

## **HUKUM BISNIS**

ASAS KEADILAN DALAM ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN .....	261-270
<i>Ahmad Fajar Herlani</i>	
PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) OBAT HERBAL DALAM UNDANG -UNDANG NO.13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	271-285
<i>Galuh Kartiko</i>	
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGJAN DALAM PRAKTEK PERBANKAN .....	286-299
<i>Shohib Muslim, Hairuz, Khrisna Hadiwinata</i>	
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERDAGANGAN E-COMMERCE DAN PERDAGANGAN KONVENTSIONAL .....	300-311
<i>Widaningsih</i>	

## **HUKUM INTERNASIONAL**

KEWENANGAN ICC ( <i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT</i> ) TERHADAP KEPALA NEGARA (STUDI KASUS PRESIDEN SUDAN-OMAR AL-BASHIR).....	312-326
<i>Ikaningtyas</i>	
MASYARAKAT DAN HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL) .....	327-346
<i>Levina Yustitianingtyas</i>	

## **HUKUM AGRARIA**

ARTIKULASI PRINSIP HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF-DETERMINATION*) DI INDONESIA: STUDI PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN347-359  
*Luh Rina Apriani,Cindy Julianti*

PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT ATAS KEPENTINGAN UMUM  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA ..... 360-374  
*Miya Savitri*

## **HUKUM ISLAM**

IJTIHAD SOSIAL SAHAL MAHFUDH DAN RELEVANSINYA DENGAN  
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ..... 375-391  
*Nurul Azizah*

